

EVALUASI KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (Studi Program Keluarga Harapan Kelurahan Merjosari Kota Malang)

Yuni Wulan Dari¹, Slamet Muchsin², Khoiron³

Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang, Jl.
MT Haryono 193 Malang, 65144, Indonesia LPPM Unisma Jl. MT Haryono 193 Malang,
65144, Indonesia

E-mail: ywln8698@gmail.com

ABSTRAK

Evaluasi Kebijakan Kesejahteraan Sosial (Studi Program Keluarga Harapan Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang). Program Keluarga Harapan merupakan program kesejahteraan masyarakat dengan memfokuskan tujuan utamanya adalah penanggulangan kemiskinan di seluruh Indonesia. Evaluasi dari kebijakan ini dilakukan atas dasar melakukan sebuah penilaian dari kebijakan yang telah diimplementasikan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian yang didapatkan adalah bahwa dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan sudah sesuai dengan dengan pedoman umum pelaksanaan namun mengalami angka peningkatan penerima manfaat yang disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat akan tingkatan kemampuan yang dimiliki.

Kata Kunci : Evaluasi Kebijakan, Program Keluarga Harapan.

Pendahuluan

Indonesia merupakan Negara yang besar dengan jumlah penduduk mencapai 250 juta jiwa. Memiliki banyak problem ekonomi yang menjadi penghambat suatu pembangunan Negara. Dan banyak pula strategi pemerintah dalam menanggulangi permasalahan-permasalahan yang ada. Salah satu penghambat kemajuan Negara Indonesia adalah terletak pada terhambatnya pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi erat kaitannya dengan kemiskinan. Perlu adanya tingkatan yang lebih spesifik yaitu harus adanya kegiatan evaluasi kebijakan. Menurut Muhadjir dalam Widodo mengemukakan “Evaluasi kebijakan publik dapat “membuahkan hasil”, dengan cara membandingkan hasil yang diperoleh dengan tujuan dan target kebijakan publik yang ditentukan”.

Namun seringkali evaluasi kebijakan diabaikan, dianggap bahwa jika suatu kebijakan akan mencapai tujuan jika kebijakan tersebut sudah dilaksanakan atau diimplementasikan. Tingkat kesejahteraan masyarakat ditentukan oleh kondisi kemiskinan. Ada berbagai macam faktor kemiskinan antara lain pendidikan yang rendah, rendahnya sumber daya manusia, dan juga rendahnya kesehatan. Program Keluarga Harapan merupakan program dengan sasaran penduduk miskin. Program Keluarga Harapan pertama kali dilakukan di Amerika Latin dikenal dengan nama Conditional Cash Transfer (CCT). Di Indonesia

Program Keluarga Harapan (PKH) dilaksanakan pertama kali pada tahun 2007 di 7 provinsi 48 kabupaten/kota.

Seperti di DKI Jakarta, Jawa timur, Jawa Barat, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur dan juga Gorontalo. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan dilakukan diseluruh Indonesia pada tahun 2013. Kelurahan Merjosari yang mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan pada tahun 2013. Program Keluarga Harapan di Kelurahan Merjosari saat ini dilaksanakan dengan baik sesuai pedoman oleh petugas dengan penerima bantuan sebanyak 102 orang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi atau memberikan sebuah penilaian terkait Program Keluarga Harapan dengan mengkaji indikator keberhasilan yang pada pelaksanaan Program Keluarga Harapan serta harapan-harapan pihak terkait Program Keluarga Harapan.

Kajian Pustaka

Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan Publik merupakan sebuah keputusan yang dilakukan demi kepentingan publik. Definisi kebijakan publik oleh Hug dan Gun dalam Hayat (2018:13) bahwa Kebijakan publik adalah *As a label for a field activity* adalah merk atau label yang akan menjadi program rutin yang diselenggarakan dan sangat erat kaitannya dalam kebijakan yang dibuat seorang pemimpin publik. Sedangkan menurut Edi Sugiono (2008:3).

Kebijakan (policy) merupakan sebuah alat pemerintah, bukan saja dalam arti government yang hanya menyangkut aparatur negara, melainkan pula governance yang menyentuh pengelolaan sumber daya publik.

Sedangkan Thomson tahun 2004 halaman 39 mengenai jenis dan cakupan pelayanan sosial. Pelayanan sosial dilakukan dengan cara pemberian beberapa fasilitas untuk masyarakat antara lain 1.) Jaminan sosial 2.) perumahan 3.) kesehatan 4.) pendidikan 5.) pelayanan sosial personal. Terdapat tujuan kebijakan publik menurut Riant Nugroho (2015:5) bahwa tujuan kebijakan publik dibagi menjadi 3 pokok bagian. Pertama, distribusi sumberdaya secara rasional. Kedua, regulasi, liberal, dan deregulasi. Dan ketiga adalah dinamika dan situasi. Kebijakan publik melakukan stabilitas terhadap situasi dan kondisi negara.

Konsep Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan publik merupakan proses akhir dari suatu tujuan kebijakan publik, bahwa keberhasilan kebijakan publik bukan dilihat dari implementasi kebijakan namun harus adanya evaluasi publik untuk menilai apakah kebijakan publik terdapat sesuai dengan sasaran dan tujuan. Sedangkan menurut Hessel Nogi (2003:161) mengutip pendapat Sarat yang mengatakan para pembuat kebijakan sering menggunakan evaluasi untuk merasionalisasikan pilihan pembuatan kebijakan dimana validitas adalah sebuah ekstensi kelayakan, yakni efektifitas. Sedangkan menurut Jones (1996) bahwa evaluasi kebijakan sebagai suatu kegiatan atau aktivitas yang dirancang untuk menilai manfaat dari suatu kebijakan atau program pemerintah yang mencakup sub-sub kegiatan seperti spesifikasi obyek, teknik pengukuran, metode analisis, dan rekomendasi yang dihasilkannya.

Menurut Dun (2003) bahwa fungsi evaluasi adalah memberikan informasi yang valid, kedua adalah dapat menjadi sumbangan kritik dan saran. Dan yang terakhir adalah sebagai rekomendasi atas nilai-nilai yang mendasari. Secara umum dapat disimpulkan bahwa fungsi evaluasi kebijakan adalah sebagai penilaian pada tingkat keberhasilan dan kegagalan dari pengimplementasian kebijakan publik apakah sesuai dengan harapan dan tujuan yang ingin di capai atau tidak sehingga kegiatan evaluasi kebijakan dapat di gunakan sebagai acuan stakeholder dalam perumusan kebijakan selanjutnya.

Konsep Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan merupakan program kesejahteraan sosial dengan sasaran atau tujuan utama dalah penanggulangan masyarakat miskin. Menurut Kementerian Sosial Republik Indonesia (2019) oleh R. Harry Hikmat Direktur Jenderal Pelindungan dan jaminan Sosial, PKH

adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Direktur Jenderal Pelindungan dan jaminan Sosial (Harry:2015). Program Keluarga Harapan di tetapkan menjadi tiga aspek yaitu; pertama, Aspek kesehatan pendidikan dan kesejahteraan sosial.

Dengan tujuan utama adalah kepentingan publik yaitu kesejahteraan sosial terutama dibidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Di dalam Permensos 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan Pasal 2 tujuan Program Keluarga Harapan antara lain:

1. Peningkatan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses pelayanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
2. Mengurangi beban pengeluaran serta peningkatan pendapatan keluarga miskin dan rentan.
3. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial.
4. Mengurangi kemiskinan kesenjangan.
5. Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat.

Penerima bantuan dilakukan dengan pendataan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, di aspek kesehatan seperti bantuan ibu hamil dan balita, aspek pendidikan adalah bantuan biaya sekolah SD dan SMP, kemudian kesejahteraan sosial adalah lansia dan rakyat miskin dengan penetapan kriteria rumah.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan menggunakan jenis metode deskriptif. Lokasi penelitian adalah Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Dengan fokus penelitian pada pelaksanaan Program Keluarga Harapan, indikator keberhasilan Program Keluarga Harapan, dan harapan pihak-pihak terkait mengenai Program Keluarga Harapan. Sumber data dengan data sekunder diperoleh dengan cara dokumentasi. Data primer diperoleh dengan cara wawancara. Dengan menggunakan analisis data *interaktif* dari Miles dan Huberman dengan 3 teknik yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Pembahasan

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan telah diatur dalam Pedoman umum pelaksanaan Program Keluarga Harapan tahun 2017. Dari hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa dari beberapa point pelaksanaan yang dilakukan oleh

petugas khusus pengurusan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Merjosari yang dapat dilakukan sebuah evaluasi atau penilaian sudah sesuai dengan pedoman pelaksanaan Program Keluarga Harapan antara lain validasi data awal, survei/pemutakhiran dan, serta pertemuan rutin/verifikasi absen sudah sesuai dengan pedoman.

Pertama, pada proses validasi data adalah dilakukan validasi ulang data awal penerima bantuan dengan konsisi terkini masyarakat sesuai dengan kriteria komponen sebagai Keluarga Penerima Manfaat. Kedua, adalah survei yang dimaksudkan adalah kegiatan petugas PKH dengan tujuan sebagai pemutakhiran data yang telah menjadi penerima bantuan Program Keluarga Harapan dengan mengumpulkan sebuah informasi kembali sebagai tujuan update data setiap 3 bulan sekali dari penerima yang sebelumnya. Jadi survei yang dimaksudkan adalah dimana petugas melakukan *update* data kembali terkait penerima bantuan, apakah penerima masih berhak menerima bantuan Program Keluarga Harapan ataupun jikalau sudah tidak memiliki kriteria. Ketiga, pertemuan rutin, Sejalan dengan hasil wawancara bahwa ada beberapa mekanisme dalam pelaksanaan program bantuan ini salah satunya adalah melakukan pertemuan rutin bagi penerima PKH. Penerima PKH diberikan undangan untuk menghadiri suatu pertemuan rutin mengenai bantuan Program Keluarga Harapan pertemuan tersebut sudah merupakan suatu komitmen antar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) kepada pemerintah terkait kaidah-kaidah serta kewajiban-kewajiban yang di amanahkan terkait bantuan yang di terima.

Mekanisme pelaksanaan yang telah dilakukan oleh petugas diambil oleh peneliti perpoint berdasarkan fokus penelitian sudah sesuai dengan podaman umum pelaksanaan Program Keluarga Harapan. Bahwa penelitian ini sasaran utamanya adalah penilaian.

Indikator keberhasilan Program Keluarga Harapan

Dari hasil penelitian indikator keberhasilan dilakukan dengan menggunakan teori Dun yaitu kriteria. Bahwa pencapaian atau tingkat keberhasilan menurut data wawancara dengan penerima manfaat bantuan yang diberikan sangat membantu kebutuhan terakit biaya anak sekolah, lansia, maupun kesehatan dan kesejahteraan yang mereka dapatkan. Begitupula dengan hasil wawancara oleh pendamping bahwa dapat dipastikan bahwa seluruh rakyat miskin telah dijangkau oleh bantuan Program Keluarga Harapan terutama dalam bidang kesehatan seluruh masyarakat miskin mendapatkan kartu kesehatan untuk kemudahan dalam pelayanan kesehatan. Namun tujuan utama evaluasi kebijakan adalah melakukan penilaian terhadap kebijakan yang telah

berjalan. Dari sini selain pandangan secara lisan atau perspektif masyarakat terhadap tingkat keberhasilan Program Keluarga Harapan yang dikaji dengan menggunakan teknik wawancara. Peneliti juga mengukur tingkat ke berhasilan dari data penerima manfaat yang di peroleh.

Dalam data Keluarga Penerima Manfaat yang diperoleh oleh peneliti 3 tahun terakhir bahwa terdapat peningkatan penerima bantuan setiap tahunnya dengan jumlah terakhir adalah 102 orang. Secara umum kesimpulannya adalah jika data penerima bantuan meningkat artinya Program Keluarga Harapan yang hakekatnya adalah dirancang sebagai penanggulangan kemiskinan dikatakan belum berhasil. Namun berdasarkan hasil wawancara dengan pendamping serta ketua PSM sesuai dengan tugas khusus yang dilakukan di bidang pengurusan Program Keluarga Harapan bahwa peningkatakan angka penerima bantuan bukan dikarenakan adanya peningkatan rakyat miskin. Namun sesuai dengan pedoman umum pelaksanaan saat pelaksanaan survei rutin dengan tujuan pemutakhiran data atau melihat kondisi terkini, sebagian besar masyarakat yang awalnya menerima namun sudah mampu tidka bersedia mundur sebagai Keluarga Penerima Manfaat.

Hal ini menjadi salah satu permasalahan yang ditemukan oleh peneliti dalam mengevaluasi kebijakan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Merjosari. Kemudian dari indikator penilaian yang dihasilkan berdasar data penerima manfaat yang meningkat tersebut terkuak pula permasalahan yang di keluhkan oleh petugas yang mengurus Program Keluarga Harapan bahwa pendamping tidak mudah dalam melakukan penghapusan nama Keluarga Penerima Manfaat walau bukti survei telah mengatakan bahwa pihak penerima sudah dapat dikatakan mampu dan tidak lagi masuk kedalam kriteria. Dengan kata lain bahwa penghapusan nama membutuhkan proses yang panjang walaupun menggunakan sistem. Diharapkan hal tersebut mampu menjadikan sumbangan kritikan bagi pemerintah maupun masyarakat pentingnya penelitian ini dalam tindakan mengevaluasi kebijakan publik yaitu Program Keluarga Harapan di Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Dari indikator keberhasilan yang memunculkan permasalahan yang ada memunculkan suatu harapan-harapan sebagai suatu kritik dan saran akan kelanjutan Program Keluarga Harapan. Harapan

Harapan Pemerintah dan Masyarakat

Suatu kebijakan publik perlu adanya evaluasi sebagai strategi dalam melakukan penilaian ataupun pengukuran tingkat keberhasilan dari kebijakan yang sudah terlaksana. Dari situ dapat terlihat kelebihan maupun kekurangan dari kebijakan publik yang telah diimplementasikan termasuk Program Keluarga Harapan. Dari

berbagai pihak Program Keluarga Harapan selain dapat membantu kebutuhan rakyat miskin namun terdapat juga permasalahan yang muncul dengan adanya evaluasi kebijakan. Permasalahan tersebut menimbulkan harapan-harapan besar Pemerintah maupun masyarakat umum agar kebijakan Program Keluarga Harapan menjadi lebih baik dan sempurna.

Harapan dari pemerintah sesuai dengan hasil penelitian adalah harus adanya perbaikan atau revisi tentang pengurusan data anggota Keluarga Penerima Manfaat. Jika dirasa sudah tidak termasuk dalam kriteria, hendaknya nama yang bersangkutan langsung dihapus dari data penerima bantuan. Dengan tujuan mempermudah sistem pendataan secara otomatis. Agar data yang dihasilkan lebih akurat. Serta mempermudah pemerintah dalam menilai keberhasilan dari kebijakan tersebut. Kemudian yang kedua adalah diharapkan bahwa status yang sudah tidak berhak menerima diharapkan mundur dari anggota KPM agar lebih mempermudah petugas dalam pemutakhiran data. Karena keasadaran masyarakat yang rendah juga berdampak pada kinerja petugas Program Keluarga Harapan dalam update data terkait penerima bantuan. Peningkatan kesadaran yang diungkapkan di atas merupakan sebuah bentuk kepedulian sosial dalam membantu pemerintah dalam melakukan penilaian terhadap kebijakan yang telah dibuat.

Kemudian harapan masyarakat adalah konsistensi pemerintah dalam memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Kemantapan pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat memang sangat dibutuhkan. Karena sebuah negara dapat dinilai maju jika warga negara di dalamnya sudah memiliki kesejahteraan yang tinggi. Dan juga *problem* yang ada terutama kemiskinan yang sangat erat hubungannya dengan kesejahteraan masyarakat haruslah memiliki perhatian khusus dari pemerintah.

Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil evaluasi kebijakan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Merjosari adalah bantuan dari Program ini berhasil membantu masyarakat yang membutuhkan dengan bukti hasil wawancara yang ungkapkan oleh masyarakat Keluarga Penerima Manfaat. Walaupun terdapat permasalahan kepedulian sosial dan kesadaran masyarakat yang rendah terkait penerimaan bantuan sosial yang sudah tidak berhak mendapatkan. Dibuktikan dengan penerima bantuan sosial yang selalu meningkat. Dari 93 menjadi 102 penerima. Namun petugas pengurus Program Keluarga Harapan selalu mengupayakan pemutakhiran data walupun sulit dalam pembaharuan data Keluarga Penerima Manfaat. Diharapkan kegiatan penelitian ini dalam mengevaluasi kebijakan pemerintah terkait Program Keluarga Harapan di Kelurahan Merjosari

Kota Malang dapat menjadi sebuah sumbangan pemikiran dan perbaikan yang lebih baik.

Daftar Pustaka

- Suharto, Edi. 2008. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta
- Noggi Hesel. 2003. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Balairung & Co, Yogyakarta
- Nugroho, Rian D. 2006. *Kebijakan Publik Untuk Negara-negara Berkembang*. Jakarta : PT Alex Media Komputindo
- Suharto, Edi. 2009. *Kemiskinan Dan Perlindungan Sosial di Indonesia*. Bandung : ALFABETA, cv
- Hayat. 2018. *Kebijakan Publik*. Malang : Intrans Publishing
- Kemsos. 2011. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin* di <https://puslit.kemsos.go.id/upload/aturan/files/f5c497935cc2794803aa5f91c3f2404e.pdf> (di akses 9 oktober)
- Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian dan Keuangan. 2015. *Kajian Program Keluarga Harapan* di <http://www.anggaran.depkeu.go.id/content/Publikasi/Kajian%20dan%20artikel/Kajian%20PKH.pdf> (di akses 16 oktober)
- Jogloabang. 2018 *permensos nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan* di <https://www.jogloabang.com/komunitas/pemensos-no-1-tahun-2018-tentang-program-keluarga-harapan> (di akses pada 1 Desember)
- Hikmat, Hery. 2019. *Pedoman Umum Pelaksanaan PKH*. Kementerian Sosial Republik Indonesia